

BAB I

PENDAHULUAN

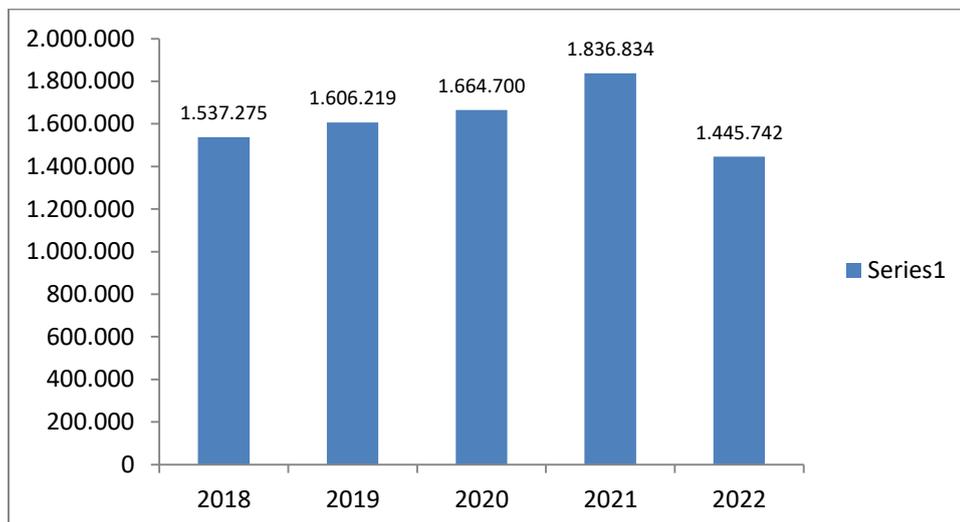
1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran dalam melaksanakan Pembangunan daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, maka diharapkan otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam upaya pembangunan daerah. Menurut (Lengongeni, 2010) pembangunan daerah otonom merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan kemampuan secara profesional dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah guna berpengaruh dalam penurunan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan nasional bernegara.

Belanja daerah memiliki urgensi sebagai alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif (Wijayanti & Babulu, 2019). Belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang menghasilkan aset tetap tertentu disebut juga dengan Belanja Modal (Triyanto, 2017). Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan setiap Belanja Modal ke dalam laporan realisasi APBD selama satu tahun anggaran. Alokasi Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan aset tetap pemerintah seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki peran penting dalam jangka panjang untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Widianto et al., 2016).

Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran atau belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk pembiayaan pembangunan daerah seperti pengadaan aset, infrastruktur, prasarana, dan sarana dasar (Sendouw et al., 2019). Belanja modal memang memiliki misi khusus untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. belanja modal mampu memudahkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat melalui pembangunan daerah (Kaligis et al., 2017). Menurut Abdul Halim (2004:73) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah. Sehingga belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyediaan dan peningkatan pelayanan fasilitas publik.



Gambar 1.1 Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

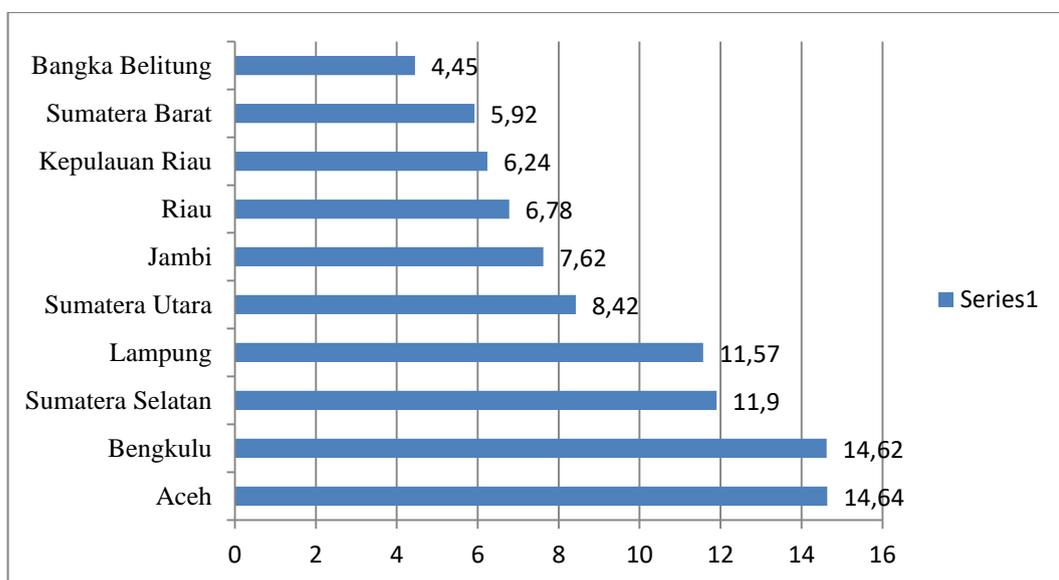
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumsel go.id,

Berdasarkan pada gambar 1 di atas menunjukkan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018-2022 secara umum yang terjadi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 nilai yang terbentuk sebesar 1,537,275 juta. Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021 dari 1,606,219 juta menjadi 1,836,834 juta dan belanja modal mengalami penurunan di tahun 2022, nilainya sebesar 1,445,742 juta.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dituntut lebih besar dalam rangka pengentasan kemiskinan supaya program dan strategi yang dikembangkan tepat sasaran hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengetahui betul karakteristik daerahnya (Saragih, 2003:83).

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di berbagai daerah. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya tetapi lebih banyak upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan untuk provinsi termiskin dan daerah pedesaan (Qi & Wu, 2015). Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Yasa, 2005)

Permasalahan Kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera, Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus menjalankan fungsi dan perannya untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi.



Gambar 1.2 Penduduk Miskin Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022 (Dalam Bentuk Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan pada gambar 2 menunjukkan persentase penduduk miskin Sepuluh provinsi di pulau Sumatera dari terendah hingga tertinggi, tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan sebagian besar masih tinggi dan di atas rata-rata nasional. Provinsi Sumatera Selatan menjadi urutan kedelapan, dengan persentase 11,90. Salah satu penyebab masalah tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan disebabkan oleh keterbatasan pada faktor produksi, produktivitas yg rendah menyebabkan pendapatan yang diterima untuk memenuhi

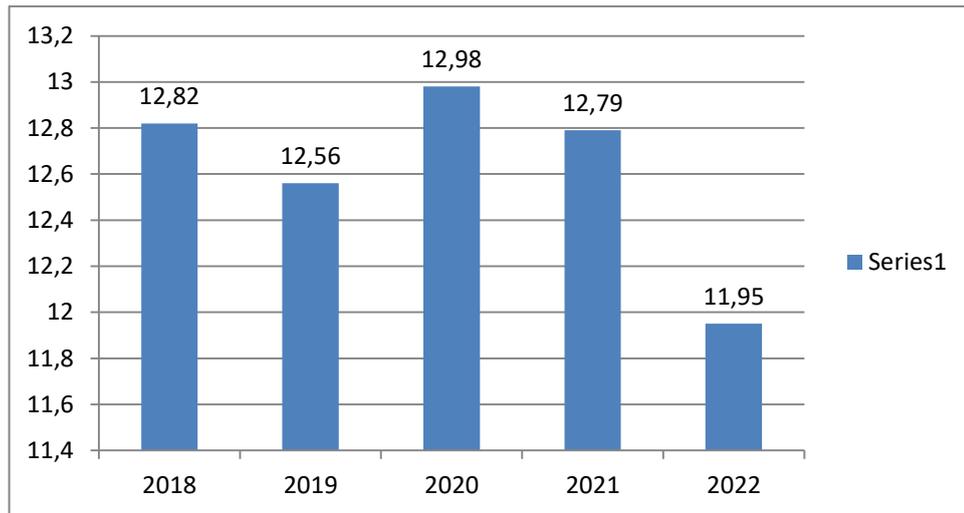
kebutuhan hidup pun jauh dari cukup. Hal tersebut akan berdampak pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang dan pangan. Selain itu, kebutuhan lain seperti kesehatan maupun pendidikan masih terhambat karena pelayanan kesehatan belum merata dan rendahnya tingkat pendidikan.

Untuk tingkat pendidikan Sumatera Selatan mendominasi di perkotaan sedangkan di pedesaan masih adanya keterbatasan akses masyarakat dalam menempuh pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan masyarakat semakin sulit untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan pedesaan masih mendominasi meskipun saat ini sekitar separuh penduduknya bertempat tinggal di daerah perkotaan (Suryahadi, 2012). Di beberapa pedesaan pun memiliki keterbatasan terhadap infrastruktur publik sehingga akses kegiatan perekonomian masyarakat menjadi sulit. Maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang ada pada suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun.

Kemiskinan menurut (Ramdass, 2010) disebabkan oleh dua hal karena sifat alami dan kebijakan pembangunan atau pemerintah. Kemiskinan karena sifat alami berarti sifat yang berasal dari sikap masyarakat atau individu, yaitu pertama keterbatasan sumber daya modal dan kedua lokasi atau letak strategis suatu wilayah yang terpececil dan sulit dijamah sehingga mengakibatkan susah berhubungan dengan penduduk wilayah maju.

Menurut (Nurwati, 2008) kemiskinan akan terus ada dalam masyarakat. Dalam lingkup pemerintah daerah, kemiskinan tentu dipandang sebagai masalah kesejahteraan sosial yang memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Pernyataan

tersebut didukung oleh Todaro (2003:20) yang menyatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran menilai kesuksesan pembangunan. Persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Selatan

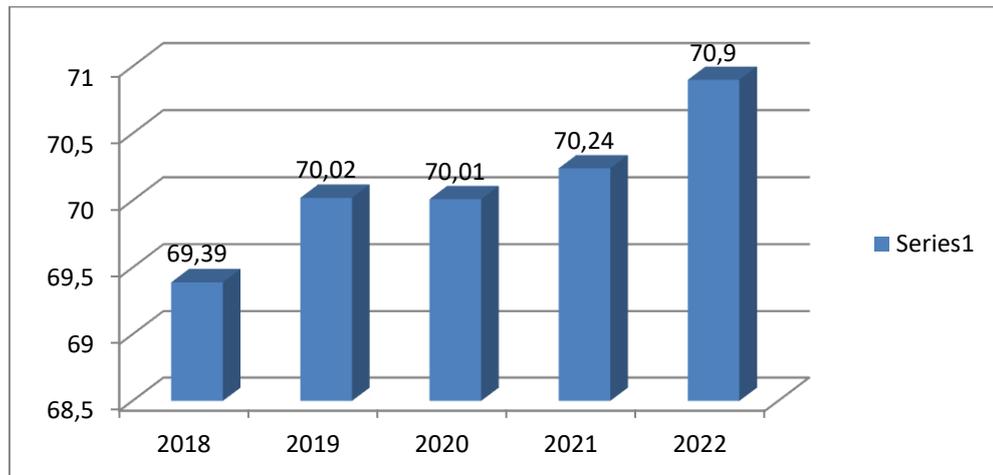
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan pada gambar 3 di atas, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dalam Lima tahun pada periode 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2018 persentase penduduk miskin sebanyak 12,82 persen. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 12,82 persen menjadi 12,56 persen. Di tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu sebanyak 12,98 persen dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021-2022 dari 12,79 menjadi 11,95 persen.

Narayan (2000) mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam 20 kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Menurut (Made Puriartha Dwi Krisna et al., 2022) Kesejahteraan diwujudkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Indeks Pembangunan Manusia suatu tolak ukuran angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacyrate*), rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) IPM berkisar antara 0 – 100, dimana daerah yang nilai IPM > 50 berada pada kelas pembangunan manusia yang rendah, daerah dengan IPM yang berkisar antara 50-65,99 berada pada kelas pembangunan manusia menengah ke bawah, sedangkan daerah dengan nilai IPM berkisar antara 66-80 berada pada kelas pembangunan manusia tinggi.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan

Berdasarkan pada gambar 4 di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan selama Lima Tahun dari periode Tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018-2019 Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan dari 69,39 menjadi 70,02 persen. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan dari 70,02 persen menjadi 70,01 persen dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 hingga 2022 dari 70,24 persen menjadi 70,90 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai IPM berada di kelas pembangunan manusia tinggi, salah satu faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya IPM yaitu perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. IPM diukur berdasarkan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli, maka pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi diantara ketiganya (Rustariyuni, 2014). Tujuan akhir dari pembangunan suatu daerah adalah kesejahteraan masyarakat, ketika pembangunan suatu daerah

mengalami penurunan maka kesejahteraan juga mengalami penurunan. Pemerataan hasil pembangunan akan menciptakan kesejahteraan, semakin merata hasil pembangunan antar daerah maka masyarakat di suatu daerah tersebut semakin sejahtera.

Pada dasarnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi pencapaian kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Hal ini juga berlaku di mana kesejahteraan warga negara merupakan salah satu tujuan yang telah tertulis dalam konstitusi pada pembukaan UUD 1945 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut, setiap daerah melakukan belanja daerah termasuk belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja pemerintah daerah (pemda).

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang terhadap penggalan sumber pendapatan dan kemandirian dalam alokasi guna menetapkan prioritas pembangunan, potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dikembangkan dan dioptimalkan hasil-hasilnya. Fungsi pemerintah terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi diupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan (Kuncoro, 2010:20). Maka kesejahteraan

merupakan hal yang mendasar yang dicita-citakan masyarakat, demikian pemerintah harus menjalankan fungsi serta perannya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan Fenomena di atas, dengan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah khususnya pada alokasi belanja modal yang terjadi dapat berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja Modal merupakan belanja daerah untuk meningkatkan aset tetap pemerintah seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki peran penting dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun disisi lain pada akhir periode tahun 2022 anggaran belanja modal Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang signifikan oleh karena itu perlunya perhatian dan peran pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah pada alokasi belanja modal agar tingkat kemiskinan lebih berkurang dan meningkatkan pelayanan publik sehingga kesejahteraan dapat berdampak kepada masyarakat, Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. maka dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar **“Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah alokasi belanja modal (X_1) dan tingkat Kemiskinan (X_2) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi

Sumatera Selatan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja modal (X_1) dan tingkat kemiskinan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Selatan baik secara persial maupun simultan.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pemberitahuan dan tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai pengaruh alokasi belanja modal (X_1) dan tingkat kemiskinan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan untuk analisis dan penelitian selanjutnya tentang pengaruh alokasi belanja modal (X_1) dan tingkat kemiskinan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Selatan.